



Pariticipatory by IAI TABAH is licensed under a Creative CommonsAttribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
15 Desember 2022	1 Pebruari 2023	30 April 2023
DOI : https://doi.org/10.58518/paritcipatory.v2i1.1829		

PHILANTROPY EKONOMI ISLAM DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
Email : enilathifah@iai-tabah.ac.id

Lailiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
Email : lailiyahlia25@gmail.com

Ummu Shofiyatul Fuada

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
Email : shofiyatulf26@gmail.com

Cindy Andini Fariskasari

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
Email : cindyandini273@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pylantropy ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan kepada Sumber Daya Manusia yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada lingkup desa. Metode penelitian ini menggunakan metode dampingan dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), yang mengutamakan asset dan potensi sumber daya manusia yang ada di sekitar Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Adanya pelaku dapat memberikan gambaran akan potensi dan ketrampilan yang dimiliki oleh institusi lembaga keuangan sekaligus bisa menilai atas kinerja yang ada. Hasil penelitian didapatkan suatu temuan atas pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengoperasionalkan serta menjalankan managerial masih belum bisa memaksimalkan



produk yang dimiliki dengan bukti bahwa pendistribusian produk yang tidak merata karena pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah menempatkan satu produk favorit yang selalu ditawarkan kepada Masyarakat tanpa melihat ketentuan dan kegunaan dari produk yang sesungguhnya. Hal ini terjadi dikarena factor ketidakfahaman sumber daya manusia yang ada atas ketentuan produk jika dilihat dari phylantrropy ekonomi Islam serta adanya otoritas terpusat sehingga sumber daya manusia yang ada hanya bisa patuh atas peraturan yang di instruksikan atasan.

Kata Kunci : Phylantrropy, ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

ABSTRACT: *This study aims to determine the implementation of Islamic economic pylanthropy by using an approach to Human Resources in Islamic Microfinance Institutions in the village scope. This research method uses the mentoring method with the Asset Based Community Development (ABCD) approach, which prioritizes assets and potential resources. human resources around Islamic Microfinance Institutions. The existence of actors can provide an overview of the potential and skills possessed by financial institutions as well as being able to assess existing performance. The research results obtained a finding on the knowledge and skills possessed by human resources in Islamic Microfinance Institutions in operating and running managerial still unable to maximize their products with evidence that the distribution of products is not evenly distributed because the Islamic Microfinance Institution places one favorite product that is always offered to the public regardless of the terms and uses of the actual product. This happens because of the lack of understanding of the existing human resources on the provisions of the product when viewed from the Islamic economic philosophy and the existence of centralized authority so that human resources can only comply with the regulations instructed by superiors.*

Keywords: *Phylantrropy, Islamic economics. Islamic Microfinance Institutions, Development and Human Resources.*

PENDAHULUAN

Desa Paciran adalah salah satu desa yang ada di pesisir utara Kabupaten Lamongan yang memiliki corak budaya Islami yang kuat dengan berbagai organisasi keagamaan baik Muhammadiyah maupun Nadhotul Ulama' atau lainnya. Masyarakat Desa Paciran mampu berjalan berdampingan dengan berbagai macam perbedaan namun yang menjadi pegangan adalah semuanya merupakan Ummat Islam yang diharuskan menjaga ukhuwah Islamiah. Kepala Desa Paciran saat ini adalah Bapak Husnul Khuluq yang memiliki pola kepemimpinan super interaktif dengan masyarakat demi mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Sejak kepemimpinan beliau Desa Paciran memiliki Infrastruktur yang lebih baik serta melaksanakan program baru yang terkemas dalam BUMDES dengan wujud Taman Kuliner Paciran (TKP) dengan harapan Desa Paciran memiliki wadah untuk masyarakatnya dalam berekspresi akan khas kuliner desa Paciran serta mengembangkan wisata Buatan yang memanfaatkan Sumber Daya



Alam berupa panorama laut yang membentang yang senantiasa memberikan keidahan dan kesejukan udara bagi yang menikmatinya.

Demografis Desa Paciran secara Kontinental mampu memperikan ruang bagi stakeholder serta lembaga Keuagan untuk berkembang baik itu Perbankan maupun non perbankan. Keberadaan Lembaga Keuangan memberikan konstribusi tersendiri bagi pengembangan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan produktifitas serta memberikan ruang untuk berinvestasi di masa depan. Sejak Tahun 2009 ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi dengan basis syariah di dalam pelaksanaan manajerialnya yakni Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Ummat Sejahtera Paciran. Perjalanan Lembaga Keuangan Syariah ini ternyata tidak bisa memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada aparat Desa Paciran akan berbedaan sistem syariah dan konvensional. Ini peneliti temukan saat melakukan survey data kepada pihak Pemerintah Desa di Tahun 2019 lalu atas Kuntitas Koperasi Syariah yang ada di Desa Paciran. Bahkan di Awal tahun 2019 juga terdapat Koperasi Syariah baru dengan Nama Surya Raharja yang terletak tidak jauh dari Balai Desa Paciran.

Peneliti sebagai pelaku pendidikan yang memiliki basis keilmuan ekonomi Islam memiliki tekad untuk memberikan pemahaman baik itu untuk aparat desa maupun masyarakat serta pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini atas teori dan praktek yang ada. Dan pada kesempatan yang ada peneliti beserta Tim yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dijalankan secara terpadu dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sejak 17 Oktober sampai 30 November 2020 dengan fokus praktek dan pengabdian dalam bidang ekonomi Islam khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Desa Paciran Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan dampingan serta Sosialisasi dilakukan dengan harapan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia atas pemahaman Lembaga Keuangan dengan basis Syariah yang telah ada di sekeliling masyarakat Desa Paciran dengan memadukan teori dan praktek yang telah berjalan selama ini.

Keberadaan Koperasi Syariah di Desa Paciran secara individu telah peneliti rasakan perbedaanya. Sebelum datangan lembaga keuangan dengan basis syariah masyarakat hanya bisa bergantung kepada perbankan konvensional yang ada begitu juga dengan koperasi konvensional yang ada. Tapi sejak 2009 Desa Paciran telah diberikan alternative yang lebih Islami yang menjadi lembaga *intermediet* keuangan dengan segala fasilitas mulai dari simpanan, pembiayaan serta pelayanan jasa. Dan di Tahun 2019 akhir muncul kembali lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat atas pemakaian fasilitas keuangan tanpa ragu akan adanya unsur riba di dalamnya.



Lembaga keuangan mikro syariah juga menjadi alat strategis kebijakan fiskal melalui sektor philanthropy Islam- ZISWAFnya. Dimana kegiatan philanthropy merupakan salah satu pilar yang ada dalam ekonomi Islam yang terdiri dari dua hal yaitu pemenuhan kebutuhan dasar para mustahiq, dan terciptanya *social equilibrium*. Instrumen utama pilar ini adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf). Salah satu pilar pelaksanaan ekonomi Islam telah di jalankan lembaga keuangan mikro syariah yakni penghimpunan Zakat serta pendistribusianya yang di sesuaikan dengan ketentuan syariah. Secara pelaksanaan terkait adanya operasional yang telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro syariah yang berupa pengadaan Zakat memang sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah atas kontribusinya.

Begitu besar peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah bagi perekonomian Islam baik untuk masayarakat Desa Paciran khususnya maupun Masyarakat Seluruh Indonesia pada Umumnya. Dari paparan yang ada kami ingin melakukan dampingan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam bentuk Koperasi Syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* untuk bisa menjadi lembaga Intermediet Keuangan Masyarakat Islami agar bisa menjalankan managerial yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah yang ada.

LANDASAN TEORI

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan non perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang di dalamnya terdapat aturan transaksi ekonomi, yaitu muamalah yang terbebas dari unsur spekulasi, riba, penimbunan harta, dan dengan dasar kerelaan, transparan dan adil.¹ LKMS juga lembaga yang berfungsi menyalurkan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, yang berupa penghimpunan dana dan penyaluran (pembiayaan) kepada masyarakat kecil, baik bersifat mencari laba dengan sistem bagi hasil maupun yang bersifat sosial atau nirlaba² LKMS juga sangat berperan sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berupaya mengembangkan usaha berskala mikro dengan konsep sistem bagi hasil yang di mana dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam upaya pengentasan kemiskinan.³ Dalam PJOK No. 12/PJOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro pasal 12 ayat 1, menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang berkegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki tugas

¹ Herry Sutanto dan Khaerul Uman, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 125.

² Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Jurnal Equilibrium, 2 (1) Juni 2014: 158.

³ Amir Mu'allim dan M. Zainal Abidin, Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman, Jurnal Millah, 4 (2) Januari 2005: .



untuk mengawasi operasional usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah disepakati oleh DSN-MUI.⁴

Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum koperasi, di mana kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariat Islam, pancasila dan UUD 1945, juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah, tanpa ada unsur lembaga zakat di dalamnya.⁵

Koperasi syariah adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah non perbankan yang memiliki badan hukum koperasi yang beroperasional dengan berdasarkan keluarga dan memiliki produk pembiayaan, simpanan dan jasa yang di dasarkan pada ketentuan syariah. Di dalam lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi syariah sering kali menggunakan nama pasanganya yaitu BMT (*Baitul Maal wat-Tamwil*) yang mana terfokus dengan pendistribusian dana ummat. Aktifitas yang biasanya dijalankan adalah dengan mengerakkan phylantropy ekonomi Islam dengan instrument berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf).

Philantropy Ekonomi Islam

Kata “filantropi” merupakan istilah baru dalam Islam, namun demikian belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disamakan dengan *al-„ata“ al-ijtima“i* yang artinya pemberian sosial, al-takaful al-insani yang artinya solidaritas kemanusiaan, „ata“ khayri yang artinya pemberian untuk kebaikan, atau sadaqah yang artinya sedekah.⁶

Kata *filantropi* berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata *philo* yang artinya cinta dan *anthrophos* yang artinya manusia ⁷. Filantropi itu sendiri lebih dekat maknanya dengan *charity*, kata yang berasal dari Bahasa Latin (*caritas*) yang artinya cinta tak bersyarat (*unconditioned love*). Namun, sebenarnya terdapat perbedaan antara kedua istilah

⁴ Nur Kholis, Ringkasan Riset Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta (Yogyakarta: DPPM UII, 2008), 4.

⁵ Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, Jurnal Hukum Islam, 12 Desember 2014: 136.

⁶ Barbara Ibrahim.. From Charity to Social Change; Trends in Arab Philanthropy, (Kairo: American University in Cairo Press 2008.. Hal: 23

⁷ Marty Sulek, “On the Classical Meaning of Philanthropia”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39:3 (2010).hal 386.



tersebut, charity cenderung mengacu pada pemberian jangka pendek, sedangkan filantropi lebih bersifat jangka panjang.⁸

Bentuk-Bentuk Filantropi Dalam Islam Islam mengenal dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia⁹. Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah SWT, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah aqidah atau keyakinan dan wasilah (jalan) untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat ¹⁰. Kesejahteraan tersebut, tidak hanya diperoleh melalui hubungan dengan tuhan semata seperti; kewajiban shalat, puasa, dan haji, melainkan juga harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial seperti kewajiban menngeluarkan zakat. Zakat termasuk infak dan sedekah berfungsi untuk menjembatani dan mempererat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan yang lemah.¹¹

Philantropy ekonomi Islam merupakan suatu kecintaan atas apa yang telah di syariahkan oleh Islam dengan mengimplementasikan dalam perekonomian demi mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan ummat. Dimana bentuk implementasi bisa dalam aktifitas menunaikan rukun Islam berupa Zakat atau amalan sunnah seperti Infaq, Shodaqoh, dan wakaf demi mendistribusikan harta kekayaan dari yang kaya ke yang miskin.

METODE

Pendampingan ini menggunakan pendekatan (ABCD) Asset Based Community Development, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar komunitas masyarakat. Masyarakat merupakan aset yang berharga bagi sebuah desa. Dengan adanya sumber daya manusia yang ada di desa dalam lingkup kecil adalah pelaku yang ada dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengaktualisasi ketrampilan dan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja yang ada perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

⁸ Lindsay Anderson, “Conspicuous Charity”, MA Thesis (Texas: Texas A&M University, 2007).hal: 26

⁹ Alhasbi S.O. and Ghazali A.H., 1994. Islamic Values and Management, (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia. Hal: 7-22

¹⁰ Ali Sakti. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.2007.hal: 19

¹¹ Jennifer Bremer, “Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice”, CSID Fifth Annual Conference “Defining and Establishing Justice in Muslim Societies”, (Washington DC, 2004).hal 1-26.



Dalam Metode ABCD memiliki lima langkah kunci untuk melakukan proses riset pendampingan diantaranya:¹²

1. *Discovery* (Menemukan)

Proses menemukan kembali kesuksesan dilakukan lewat proses percakapan atau wawancara dan harus menjadi penemuan personal tentang apa yang menjadi kontribusi individu yang memberi hidup pada sebuah kegiatan atau usaha. Pada tahap *discovery*, kita mulai memindahkan tanggung jawab untuk perubahan kepada para individu yang berkepentingan dengan perubahan tersebut yaitu entitas lokal. Pendamping melakukan wawancara kepada pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah tentang operasional dan penerapan atas kinerja keuangan yang ada. Wawancara tersebut dapat digiring untuk mengetahui aset dan potensi yang ada. Wawancara ini bersifat cerita antara masyarakat dengan pendamping sehingga yang banyak berbicara nantinya adalah masyarakat pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2. *Dream* (Impian)

Dengan cara kreatif dan secara kolektif melihat masa depan yang mungkin terwujud, apa yang sangat dihargai dikaitkan dengan apa yang paling diinginkan. Pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk organisasi. Sebuah mimpi atau visi bersama terhadap masa depan yang bisa terdiri dari gambar, tindakan, kata-kata, dan foto. Setelah melakukan wawancara kepada pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah pendamping mulai mengetahui impian atau keinginan masyarakat Paciran. Setelah mengetahui keinginan atau impian maka langkah selanjutnya yaitu merancang sebuah kegiatan untuk memenuhi impian masyarakat

3. *Design* (Merancang)

Proses di mana seluruh komunitas (atau kelompok) terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa mulai memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah ditetapkan sendiri. Proses merencanakan ini merupakan proses cara mengetahui aset-aset yang ada pada pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Aset yang terlihat di wilayah Desa Paciran adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Surya Raharja. Aset ini yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi impian masyarakat Desa Paciran.

¹² Christopher Dureau, *Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan*, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, (Agustus 2013), hal. 96-97



4. Define (Menentukan)

Kelompok pemimpin sebaiknya menentukan 'pilihan topik positif': tujuan dari proses pencarian atau deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. Pendampingan dengan masyarakat terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD). Pada Proses FGD pendamping dan masyarakat menentukan fokus pembahasan. Fokus pembahasan yang akan dibahas berupa hal yang positif. Proses FGD tersebut bisa berjalan dengan lancar kalau sudah disepakati pembahasan yang akan dibahas dalam diskusi antara pendamping dan masyarakat Desa Paciran serta masyarakat sekitar lembaga Keuangan Mikro Syariah

5. *Destiny* (Lakukan)

Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung proses belajar terus menerus dan inovasi tentang "apa yang akan terjadi." Hal ini merupakan fase akhir yang secara khusus fokus pada cara-cara personal dan organisasi untuk melangkah maju. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati untuk memenuhi impian masyarakat dari pemanfaatan aset. Selain untuk memenuhi impian masyarakat agar berkembangnya agrowisata Belimbing bisa meluas. Teori pada dasarnya adalah petunjuk (guide) dalam melihat realitas di masyarakat. teori dijadikan pola pikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada masyarakat. Pendampingan ini menggunakan pendekatan teori Asset Based Community Development (ABCD), yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh masyarakat. Untuk kemudian digunakan sebagai bahan yang memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Prinsip – Prinsip Penelitian Pendampingan

1) Setengah Terisi lebih Berarti (*Half Full Half Empty*)

Salah satu modal utama dalam program pengabdian terhadap masyarakat berbasis aset adalah merubah cara pandang komunitas terhadap dirinya. Tidak hanya terpaku pada kekurangan dan masalah yang dimiliki. Tetapi memberikan perhatian kepada apa yang dipunyai dan apa yang dapat dilakukan.

2) Semua Punya Potensi (*Nobody Has Nothing*)

Dalam konteks ABCD, prinsip ini dikenal dengan istilah "*Nobody has nothing*". Setiap manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang tidak memiliki potensi, walau hanya sekedar kemampuan untuk tersenyum dan memasak air. Semua berpotensi dan semua bisa berkontribusi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat untuk tidak berkontribusi nyata terhadap perubahan lebih baik. Bahkan,



keterbatasan fisikpun tidak menjadi alasan untuk tidak berkontribusi. Ada banyak kisah dan inspirasi orang-orang sukses yang justru berhasil membalikkan keterbatasan dirinya menjadi sebuah berkah, sebuah kekuatan.¹³

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Partisipasi berarti peran yang sangat urgent terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan. Pengertian tentang partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

3) Kemitraan (*Partnership*)

Partnership merupakan salah satu prinsip utama dalam pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset (*Asset Based Community Development*). *Partnership* merupakan modal utama yang sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan posisi dan peran masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pembangunan dimana yang menjadi motor dan penggerak utamanya adalah masyarakat itu sendiri (*community driven development*). Karena pembangunan yang dilakukan dalam berbagai variannya seharusnya masyarakatlah yang harus menjadi penggerak dan pelaku utamanya. Sehingga diharapkan akan terjadi proses pembangunan yang maksimal, berdampak empowerment secara masif dan terstruktur. Hal itu terjadi karena dalam diri masyarakat telah terbentuk rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap pembangunan yang terjadi di sekitarnya.

4) Penyimpangan Positif (*Positive Deviance*)

Positive Deviance atau (PD) secara harfiah berarti penyimpangan positif. Secara terminologi *positive deviance* (PD) adalah sebuah pendekatan terhadap perubahan perilaku individu dan sosial yang didasarkan pada realitas bahwa dalam setiap masyarakat meskipun bisa jadi tidak banyak terdapat orang-orang yang mempraktekkan strategi atau perilaku sukses yang tidak umum, yang memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang lebih baik atas masalah yang dihadapi daripada rekan-rekan

¹³ Nadhir Salahuddin, Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 21



mereka. Praktek tersebut bisa jadi, seringkali atau bahkan sama sekali keluar dari praktek yang pada umum dilakukan oleh masyarakat. Realitas tersebut mengisyaratkan bahwa sering kali terjadi pengecualian-pengecualian dalam kehidupan masyarakat dimana seseorang atau beberapa orang mempraktekkan perilaku dan strategi berbeda dari kebanyakan masyarakat pada umumnya. Strategi dan perilaku tersebut yang membawa kepada keberhasilan dan kesuksesan yang lebih dari yang lainnya. Energi itu senantiasa dibutuhkan dalam konteks lokalitas masing-masing komunitas.

5) Berawal Dari Masyarakat (*Endogenous*)

Endogenous dalam konteks pembangunan memiliki beberapa konsep inti yang menjadi prinsip dalam pendekatan pengembangan dan pemberdayaan komunitasmasyarakat berbasis asset-kekuatan.

Beberapa konsep ini tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memiliki kendali lokal atas proses pembangunan. 2. Mempertimbangkan nilai budaya secara sungguh-sungguh. 3. Mengapresiasi cara pandang dunia. 4. Menemukan keseimbangan antara sumber internal dan eksternal.

Beberapa aspek di atas merupakan kekuatan pokok yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Sehingga dalam aplikasinya, konsep "pembangunan endogen" kemudian mengakuinya sebagai aset kekuatan utama yang bisa dimobilisasi untuk digunakan sebagai modal utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Aset dan kekuatan tersebut bisa jadi sebelumnya terabaikan atau bahkan seringkali dianggap sebagai penghalang dalam pembangunan.

Pembangunan Endogen mengubah aset-aset tersebut menjadi aset penting yang bisa dimobilisasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan. Metode ini menekankan dan menjadikan aset-aset tersebut sebagai salah satu pilar pembangunan. Sehingga dalam kerangka pembangunan endogen, aset-aset tersebut kemudian menjadi bagian dari prinsip pokok dalam pendekatan ABCD yang tidak boleh dinegaskan sedikitpun.

6) Menuju Sumber Energi (*Heliotropic*)

Energi dalam pengembangan bisa beragam. Di antaranya adalah mimpi besar yang dimiliki oleh komunitas, proses pengembangan yang apresiatif, atau bisa juga keberpihakan anggota komunitas yang penuh totalitas dalam pelaksanaan program. sumber energi ini layaknya keberadaan matahari bagi tumbuhan. Terkadang bersinar dengan terang, mendung, atau bahkan tidak bersinar sama sekali. Sehingga energi dalam komunitas ini harus tetap terjaga dan dikembangkan. Masyarakat seharusnya



mengenali peluang-peluang sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, yang mampu memberikan pendapatan perekonomian mereka dan kekuatan baru dalam proses pengembangan. Sehingga tugas komunitas tidak hanya menjalankan program saja, melainkan secara bersamaan memastikan sumber energy dalam kelompok mereka tetap terjaga dan berkembang.

Teknik-Teknik Pendampingan

Metode dan alat menemukan dan memobilisasi aset untuk pemberdayaan masyarakat melalui *Asset Based Community Development* (ABCD), antara lain:

- 1) Penemuan Apresiatif (*Appreciative Inquiry*) *Appreciative Inquiry* (AI) adalah cara yang positif untuk melakukan perubahan organisasi berdasarkan asumsi yang sederhana yaitu bahwa setiap organisasi memiliki sesuatu yang dapat bekerja dengan baik, sesuatu yang menjadikan organisasi hidup, efektif dan berhasil, serta menghubungkan organisasi tersebut dengan komunitas dan stakeholdersnya dengan cara yang sehat.¹⁴ AI dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal positif dan menghubungkannya dengan cara yang dapat memperkuat energi dan visi untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan masa depan organisasi yang lebih baik. AI melihat isu dan tantangan organisasi dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan pendekatan yang fokus pada masalah, AI mendorong anggota organisasi untuk fokus pada hal-hal positif yang terdapat dan bekerja dengan baik dalam organisasi. AI tidak penganalisis akar masalah dan solusi tetapi lebih konsen pada bagaimana memperbanyak hal-hal positif dalam organisasi. Proses AI terdiri dari 4 tahap yaitu *Discovery*, *Dream*, *Design* dan *Destiny* atau sering disebut Model atau Siklus 4-D. AI ini diwujudkan dengan adanya *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilakukan pada jenjangnya masing – masing.
- 2) Pemetaan Komunitas (*Community Mapping*) Pendekatan atau cara untuk memperluas akses ke pengetahuan lokal. Community map merupakan visualisasi pengetahuan dan persepsi berbasis masyarakat mendorong pertukaran informasi dan menyetarakan bagi semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang mempengaruhi lingkungan dan hidup mereka. .
- 3) Pemetaan Asosiasi dan Institusi Asosiasi merupakan proses interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial yang terbentuk karena memenuhi faktor-faktor sebagai berikut: (1) kesadaran akan kondisi yang sama, (2) adanya relasi

¹⁴ Nadhir Salahuddin dkk, Panduan KKN ABCD UIN Suanan Ampel Surabaya, (Surabaya: LP2M UIN Suanan Ampel Surabaya, 2015) hal, 47



sosial, dan (3) orientasi pada tujuan yang telah ditentukan.¹⁵⁴⁾ Pemetaan Aset Individu (*Individual Inventory Skill*) Metode atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan individual asset antara lain kuisioner, interview dan focus group discussion.

Manfaat dari Pemetaan Individual Aset antara lain: a. Membantu membangun landasan untuk memberdayakan masyarakat dan memiliki solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. b. Membantu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. c. Membantu masyarakat mengidentifikasi keterampilan dan bakat mereka sendiri.

- 4) Sirkulasi Keuangan (*Leacky Bucket*) Perputaran ekonomi yang berupa kas, barang dan jasa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari komunitas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa jauh tingkat dinamitas dalam pengembangan ekonomi lokal mereka dapat dilihat, seberapa banyak kekuatan ekonomi yang masuk dan keluar. Untuk mengenali, mengembangkan dan memobilisir asset-asset tersebut dalam ekonomi komunitas atau warga lokal diperlukan sebuah analisa dan pemahaman yang cermat. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) adalah melalui Leacky Bucket.¹⁶
- 5) Skala Prioritas (*Low hanging fruit*) Setelah masyarakat mengetahui potensi, kekuatan dan peluang yang mereka miliki dengan melalui menemukan informasi dengan santun, pemetaan asset, penelusuran wilayah, pemetaan kelompok atau institusi dan mereka sudah membangun mimpi yang indah maka langkah berikutnya, adalah bagaimana mereka bisa melakukan semua mimpi-mimpi diatas, karena keterbatasan ruang dan waktu maka tidak mungkin semua mimpi mereka diwujudkan.
- 6) Pemetaan Aset Individu (*Individual Inventory Skill*) Metode atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan individual asset antara lain kuisioner, interview dan focus group discussion.¹⁷

Manfaat dari Pemetaan Individual Aset antara lain: a. Membantu membangun landasan untuk memberdayakan masyarakat dan memiliki solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. b. Membantu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. c. Membantu masyarakat mengidentifikasi keterampilan dan bakat mereka sendiri.

¹⁵ Soetomo, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 41

¹⁶ Christopher Dureau, Pembaruan dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, (Agustus 2013), hal. 44

¹⁷ Soetomo, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 41



Langkah-langkah Pendampingan

Tahap 1: Mempelajari dan Mengatur Skenario Dalam Appreciative Inquiry (AI) terkadang disebut 'Define'. Dalam Asset Based Community Development (ABCD), terkadang digunakan frasa "Pengamatan dengan Tujuan atau Purposeful Reconnaissance". Pada dasarnya terdiri dari dua elemen kunci-memanaatkan waktu untuk mengenal orang-orang dan tempat di mana perubahan akan dilakukan, dan menentukan focus program. Ada empat langkah terpenting di tahap ini, yakni menentukan:¹⁸ 1. Tempat 2. Orang 3. Fokus Program 4. Informasi tentang Latar Belakang

Tahap 2: Menemukan Masa Lampau

Kebanyakan pendekatan berbasis aset dimulai dengan beberapa carauntuk mengungkap (discovering) hal-hal yang memungkinkan sukses dan kelentingan di komunitas sampai pada kondisi sekarang ini. Kenyataan bahwa masyarakat Ngringinrejo masih berfungsi sampai saat ini membuktikan bahwa ada sesuatu dalam masyarakat yang harus dirayakan. Tahap ini terdiri dari: 1. Mengungkap (*discover*) sukses-apa sumber hidup dalam komunitas. Apa yang memberi kemampuan untuk tiba di titik ini dalam rangkaian perjalannya. Siapa yang melakukan lebih baik. 2. Menelaah sukses dan kekuatan elemen-elemen dan sifat khusus apa yang muncul dari telaah cerita-cerita yang disampaikan oleh komunitas.

Tahap 3: Memimpikan Masa Depan

Memimpikan masa depan atau proses pengembangan visi (*visioning*) adalah kekuatan positif luar biasa dalam mendorong perubahan. Tahap ini mendorong komunitas menggunakan imajinasinya untuk membuat gambaran positif tentang masa depan mereka. Proses ini menambahkan energy dalam mencari tahu "apa yang mungkin."

Tahap 4: Memetakan Aset

Tujuan pemetaan aset adalah agar komunitas belajar kekuatan yang sudah mereka miliki sebagai bagian dari kelompok. Apa yang bisa dilakukan dengan baik sekarang dan siapa di antara mereka yang memiliki keterampilan atau sumber daya alam yang ada di desa. Mereka ini kemudian dapat diundang untuk berbagi kekuatan demi kebaikan seluruh kelompok atau komunitas.²¹ Pemetaan dan seleksi aset dilakukan dalam 2 tahap: a. Memetakan aset komunitas atau bakat, kompetensi dan sumberdaya sekarang. b. Seleksi mana yang relevan dan berguna untuk mulai mencapai mimpi komunitas.

¹⁸ Christopher Dureau, Pembaru dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan, Ibid. hal. 44



Tahap 5: Menghubungkan dan Menggerakkan Aset/Perencanaan Aksi

Tujuan penggolongan dan mobilisasi aset adalah untuk langsung membentuk jalan menuju pencapaian visi atau gambaran masa depan. Hasil dari tahapan ini harusnya adalah suatu rencana kerja yang didasarkan pada apa yang bisa langsung dilakukan diawal, dan bukan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga dari luar. Walaupun lembaga dari luar dan potensi dukungannya, termasuk anggaran pemerintah adalah juga set yang tersedia untuk dimobilisasi, maksud kunci dari tahapan ini adalah untuk membuat seluruh masyarakat menyadari bahwa mereka bisa mulai memimpin proses pembangunan lewat kontrol atas potensi aset yang tersedia dan tersimpan.

Tahap 6: Pemantauan, Pembelajaran dan Evaluasi

Pendekatan berbasis aset juga membutuhkan studi data dasar (baseline), monitoring perkembangan dan kinerja outcome. Tetapi bila suatu program perubahan menggunakan pendekatan berbasis aset, maka yang dicari bukanlah bagaimana setengah gelas yang kosong akan diisi, tetapi bagaimana setengah gelas yang penuh dimobilisasi. Pendekatan berbasis aset bertanya tentang seberapa besar anggota organisasi masyarakat mampu menemukan dan memobilisasi secara produktif aset mereka mendekati tujuan bersama. Empat pertanyaan kunci Monitoring dan Evaluasi dalam pendekatan berbasis aset adalah: 1. Apakah komunitas sudah bisa menghargai dan menggunakan pola pemberian hidup dari sukses mereka di masa lampau? 2. Apakah komunitas sudah bisa menemukan dan secara efektif memobilisasi aset sendiri yang ada dan yang potensial (keterampilan, kemampuan, sistem operasi dan sumber daya)? 3. Apakah komunitas sudah mampu mengartikulasi dan bekerja menuju pada masa depan yang diinginkan atau gambaran suksesnya? 4. Apakah kejelasan visi komunitas dan penggunaan aset dengan tujuan yang pasti telah mampu memengaruhi penggunaan sumber daya luar (pemerintah) secara tepat dan memadai untuk mencapai tujuan bersama?¹⁹

PEMBAHASAN

Profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Profil KSPPS BMT Surya Raharja adalah sebutan ringkas dari Baitul Mal wat Tamwil. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan BMT

¹⁹ Nadhir Salahuddin dkk, Panduan KKN ABCD, (LP2M Sunan Ampel Surabaya, 2015) hal, 103-104



lainnya adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, shadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT Surya Raharja didirikan pada tahun 2011 di Pasar Pahing Palang. Dipelopori oleh Bapak Taufiqur Rochman, S.Ag. Pada tanggal 5 Juli 2014, Koperasi BMT Surya Raharja telah resmi berbadan hukum dengan nomor pengesahan akta pendirian koperasi 19/BH/KDK.13-28/1.2/VII/2000 atas nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang berkedudukan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pada saat itu masih bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS, namun setelah ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang sudah berjalan pada saat peraturan Menteri ini berlaku. Akan tetapi melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya peraturan ini yaitu tanggal 8 Oktober 2015. Maka pada tanggal 18 Januari 2016, KJKS (Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah) BMT Surya Raharja berganti menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Surya Raharja.²⁰

KSPPS BMT Surya Raharja didirikan dengan maksud menggalang kerjasama para anggota yang memajukan kepentingan ekonomi anggota pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 19 Motto dari BMT Surya Raharja adalah mitra anda sesuai syariah. Visi dari BMT Surya Raharja yaitu menjadi koperasi terbaik di Indonesia. Sejalan dengan itu, misi dari BMT Surya Raharja adalah menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia, dan mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Kelebihan dari BMT Surya Raharja di antaranya adalah tidak adanya sistem potongan dalam simpanan, proses pencairan dana yang mudah dan cepat, menawarkan layanan jemput bola, serta adanya kejelasan izin usaha dan juga berintegritas.

²⁰ Hasil wawancara dengan pihak manager KSPPS BMT Surya raharja Ibu Nur Ilmiyah, S.Pd pada tanggal 1 November 2020 pukul 09.00 WIB.



Produk-Produk BMT Surya Raharja.²¹

a. Produk Simpanan

- 1) SiMasa, dimana merupakan produk simpanan yang dikelola oleh BMT dengan prinsip wadiah. Memiliki keunggulan bebas biaya administrasi bulanan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Syarat pendaftaran SiMasa adalah anggota harus menyetorkan photocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 20.000.
- 2) SimJaka, dimana merupakan produk simpanan berjangka panjang berdasarkan prinsip mudharabah, bagi hasil akan dibagikan antara mudhorib (anggota) dan BMT sesuai nisbah yang telah disepakati. Mempunyai keunggulan berupa bagi hasil dapat diambil per bulan, bebas biaya administrasi bulanan dan jika memiliki SimJaka ini dapat dijadikan agunan pemberian. Syarat pendaftaran SimJaka adalah anggota menyetorkan photocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 30.000.
- 3) SiBerkah, dimana merupakan produk simpanan berhadiah langsung dengan sistem mudharabah. Memiliki keunggulan bebas pajak dan hadiah bisa request sesuai keinginan. Syarat pendaftaran SiBerkah adalah anggota menyetorkan photocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 30.000.
- 4) SimPatik, dimana merupakan produk simpanan perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah sampai perguruan tinggi dengan sistem wadiah yad dhamanah. Mempunyai keunggulan bagi setiap anggota SimPatik berhak dapat hadiah peralatan sekolah setiap kenaikan kelas, dapat mengambil bagi hasil setiap tamat jenjang pendidikan dan yang berprestasi akan dapat beasiswa dengan bukti menyetorkan photocopy raport terlegalisir. Syarat pendaftaran SimPatik adalah anggota menyetorkan photocopy Akta, photocopy KK dan membayar uang administrasi senilai Rp 110.000.
- 5) SiHanum, dimana merupakan produk simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dengan sistem wadiah yad dhamanah. Memiliki keunggulan bebas biaya manasik, bebas biaya administrasi bulanan, dan tersedia dana talangan dengan setoran ringan. Syarat pendaftaran SiHanum adalah anggota menyetorkan photocopy KTP, photocopy KK, setoran awal minimal Rp 500.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000, dan pendaftaran ke kantor KEMENAG dilakukan bila saldo rekening sudah memenuhi jumlah yang ditentukan oleh KEMENAG.

b. Produk Pembiayaan Rahn, dimana merupakan produk pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan pinjaman dengan prinsip ar-Rahn. Memiliki keunggulan dapat dibayar

²¹ Data yang peneliti salin pada tanggal 28 Desember 2020 dari brosur serta tambahan keterangan dari Ibu Ilmi selaku Manager KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Paciran



harian, mingguan, bulanan, maupun musiman (4 bulan). Syarat pengajuannya adalah anggota harus menyetorkan photocopy KTP suami istri, photocopy surat nikah, photocopy KK, dan photocopy agunan.²²

Pengembangan Pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam Pendistribusian Philantropy Ekonomi Islam.

Pengetahuan dan Keterampilan dalam mengoperasionalkan suati Lembaga Keuangan Mikro Syariah wajib dimiliki oleh Sumber Daya Manasia sebagai aktor utama. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan *Baitul Maal wat Tamwil* (KSPPS BMT) Surya Raharja Paciran memilki konstribusi penting dalam mendampingi masyarakat Desa Paciran dalam mengoperasionalkan dan mendirstribusiakan philantropy ekonomi Islam. Peneliti berserta Tim diberikan kesempatan untuk dapat mendampingi dan memberi literasi keuangan mengenai manajerial perusahaan baik sektor keuangan maupun produk yang dipasarkan.

Literasi Keuangan yang kami lakukan sebagai bentuk aksi dampingan dalam mewujudkan meningkatkan serta mengembangkan pemahaman dan pengetahuan terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberikan kesan tersendiri bagi para Sumber Daya Manusia di KSPPS BMT Surya Raharja karena mereka sebelumnya tidak mengetahui topic atau literasi yang kita berikan kepada mereka. Seperti contoh literasi yang kami berikan adalah implementasi dan ketentuan yang sebenarnya dalam produk-produk yang mereka pasarkan dan seharusnya ada pengembangan produk dengan memakai akad yang sesuai. Selain itu ada literasi terkait jenis laporan keuangan apa yang seharusnya digunakan dalam mengoperasionalkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini. Segala laporan keuangan yang ada harus benar-benar tepat dan sesuai penggunaanya agar bisa menjalankan apa yang telah pemerintah rancangkan lewat Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) Syariah yang telah di susun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk entitas syariah yang ada di Indonesia.

Alasan kami memberikan literasi atas pengetahuan serta ketampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengoperasionalkan serta menjalankan managerial masih belum bisa memaksimalkan produk yang dimiliki dengan bukti bahwa pendistribusian produk yang tidak merata karena pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah menempatkan satu produk favorit yang selalu ditawarkan kepada Masyarakat tanpa melihat ketentuan dan kegunaan dari produk yang sesungguhnya. Hal ini terjadi dikarena faktor

²² Dokumentasi yang bersumber dari KSPPS BMT Surya Raharja yang peneliti dicatat kembali pada tanggal 14 November 2020 pukul 13.00 WIB



ketidakfahaman sumber daya manusia yang ada atas ketentuan produk jika dilihat dari phylantrropy ekonomi Islam serta adanya otoritas terpusat sehingga sumber daya manusia yang ada hanya bisa patuh atas peraturan yang di instruksikan atasan.

Harapan kami setelah kami mengadakan literasi keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah kepada Sumber Daya Manusia dengan bentuk dampingan ini mampu memberikan sikap tegas dan benar-benar menyesuaikan dengan ketentuan syariah atas apa yang telah dijalankan. Meski dalam praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki prospek besar dan sudah menjadi Lembaga Keuangan di hati Masyarakat Desa Paciran. Integritas kepimpinan memang sangat perlu diperhatikan hanya itu harus diimbangi dengan adanya pengetahuan dan ketrampilan dalam pemahaman apa yang menjadi produk dan aplikasi keuangan.

SIMPULAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengoperasionalkan serta menjalankan managerial masih belum bisa memaksimalkan produk yang dimiliki dengan bukti bahwa pendistribusian produk yang tidak merata karena pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah menempatkan satu produk favorit yang selalu ditawarkan kepada Masyarakat tanpa melihat ketentuan dan kegunaan dari produk yang sesungguhnya. Hal ini terjadi dikarena faktor ketidakfahaman sumber daya manusia yang ada atas ketentuan produk jika dilihat dari phylantrropy ekonomi Islam serta adanya otoritas terpusat sehingga sumber daya manusia yang ada hanya bisa patuh atas peraturan yang di instruksikan atasan

DAFTAR PUSTAKA

Alhasbi S.O. and Ghazali A.H., 1994. *Islamic Values and Management*, Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia.

Ali Sakti. 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.

Barbara Ibrahim. 2008. *From Charity to Social Change; Trends in Arab Philanthropy*, (Kairo: American University in Cairo Press.



Jennifer Bremer, 2004. "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", CSID Fifth Annual Conference "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies", .Washington DC.

Kholis, Nur, 2008. *Ringkasan Riset Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: DPPM UII

Lindsay Anderson, 2007. "Conspicuous Charity", MA Thesis, Texas: Texas A&M University.

Marty Sulek, 2010. "On the Classical Meaning of Philanthropia", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

Mua'allim, Amir, M. Zainal Abidin, 2005. *Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman*, Jurnal Millah, 4 (2) Januari: 17

Nadhir Salahuddin dkk, 2015. *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, hal, 47

Sa'diyah, Mahmudatus, Meuthiya Athifa Arifin, 2014. *Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jurnal Equilibrium, 2 (1) Juni: 158.

Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Susanto, Herry Sutanto, Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia